



SOAL UANG RP 130 JUTA DAN PROYEK DRAINASE

Pemkot Konsultasi KPK Agar Tak Salah Jalan

UMBULHARJO (MERAPI)- Pemkot Yogya belum bersikap terkait temuan uang Rp 130 juta yang diamankan KPK di rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, AL. Sementara itu, dua oknum PNS yang sempat diperiksa KPK dalam kasus suap proyek drainase, masih sebatas saksi.

iMestinya hari ini (kemarin) masuk. Tapi saya belum dapat laporan, ujar Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi kepada wartawan, Senin (26/8).

Seperti diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka kasus suap proyek drainase Jalan Soepomo CS Yogya. Mereka adalah dua oknum jaksa dan satu rekanan. Selain itu, dua PNS Kota Yogya ikut diperiksa sebagai saksi. Belakangan saat pengeledahan di rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan ** Bersambung ke halaman 9*

dan Kawasan Permukiman, AL, KPK menemukan uang Rp 130 juta

Heroe mengaku belum ada komunikasi resmi dari KPK terkait kasus tersebut. Dia menyebut dua PNS Pemkot Yogya yang sempat dimintai klarifikasi KPK di Jakarta masih berstatus saksi. Menurutnya dua PNS itu pada Senin (26/8) seharusnya sudah masuk kembali bekerja setelah beberapa hari mendapat izin usai pemeriksaan KPK.

Sedangkan mengenai temuan uang Rp 130 juta di rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat, dia menilai hal itu menjadi ranah KPK dan yang bersangkutan. Pemkot Yogyakarta memang prinsip asas praduga tak ber-

salah. "Karena tidak ada larangan punya uang Rp 130 juta di rumah. Tapi dari mana uang itu silahkan klarifikasi ke yang bersangkutan dan KPK," pungkas Heroe.

Sementara itu, nasib proyek saluran air hujan (SAH) di Jalan Soepomo CS yang terhenti pengerjaannya, belum ada kejelasan sampai kini. Pemkot Yogyakarta masih menunggu hasil konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proyek SAH itu lantaran rekanan tersangkut hukum dugaan suap.

"Kami belum tahu. Makanya perlu menunggu konsultasi ke KPK dan pihak-pihak lain bagaimana menyelesaikannya," kata Heroe Poerwadi.

Dia menyatakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerin-

tah (LKPP) menyarankan agar proyek SAH Jalan Soepomo CS dihentikan. Namun pihaknya juga melihat dampak jika proyek itu dihentikan akan menjadi masalah bagi masyarakat sekitar karena sudah dilakukan penggalan. Diakuinya masyarakat sekitar juga menghendaki proyek perbaikan SAH itu dilanjutkan.

"Kalau akan dilanjutkan bagaimana ? Apakah akan dilanjutkan oleh yang bersangkutan (rekanan) atau dilelang ulang," ujarnya.

Dia menyampaikan jika proyek SAH dihentikan maka fungsi jalan harus dikembalikan lagi. Konsekuensinya akan mengeluarkan biaya untuk normalisasi jalan yang sudah dibongkar. Namun diakuinya jika proyek SAH dilanjutkan juga harus memper-

timbangkan sisa waktu tahun anggaran.

"Supaya tidak salah makanya kami konsultasikan dulu. Kalau kami salah menanganinya bisa jadi masalah hukum," imbuh Heroe.

Namun saat ditanya kapan target konsultasi ke KPK diselesaikan, pihaknya menyatakan akan mengumpulkan dulu laporan-laporan dari instansi terkait. Termasuk dari dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Yogyakarta yang sebelumnya sempat dimintai klarifikasi oleh KPK di Jakarta.

"Kejadian minggu lalu kami belum dapat laporan. Kami akan kumpulkan laporan. Dari yang bersangkutan sendiri kami belum dapat laporan apa yang terjadi di KPK," tegasnya.

(Tri) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Pengendalian Pembanguna			
3. Inspektorat			
4. Dinas PUPKP			
5. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005